



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI SELASA, 29 JANUARI 2013



DAFTAR ISI

Komitmen Investasi	1
Infrastruktur	2- 3
Kerusakan Jalan	4
Air Bersih	5
Perkebunan	6



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<input checked="" type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Agt	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des																			

2013

<input type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia
<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input type="checkbox"/> Pikiran Rakyat
<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input checked="" type="checkbox"/> Kontan
<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Neraca	<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Indopos

☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Komitmen Investasi	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, komitmen investasi yang didapatkan sepanjang 2012 lalu mencapai Rp. 868,3 triliun. Meski minat investasi di Indonesia terbilang tinggi, investor masih mengeluhkan sejumlah hal. Salah satu yang kerap dikeluhkan adalah buruknya infrastruktur					

Komitmen Investasi



KONTAN/Fransiskus Simbolon

Para pekerja sibuk bekerja di proyek pembangunan flyover non tol di kawasan Dr. Satrio, Jakarta, Minggu (27/1). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, komitmen investasi yang didapatkan sepanjang 2012 lalu mencapai Rp 868,3 triliun. Meski minat investasi di Indonesia terbilang tinggi, investor masih mengeluhkan sejumlah hal. Salah satu yang kerap dikeluhkan investor adalah buruknya infrastruktur.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☒

 Jan

☐

 Feb

☐

 Mar

☐

 Apr

☐

 Mei

☐

 Jun

☐

 Jul

☐

 Agt

☐

 Sep

☐

 Okt

☐

 Nov

☐

 Des

2013

☒ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Infrastruktur (Menara telekomunikasi tumbuh)	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk, perusahaan penunjang telekomunikasi, menargetkan pertumbuhan pendapatan tahun ini hingga 50 persen dari tahun sebelumnya dan peningkatan ini akan ditopang bertambahnya menara perseroan minimal 6.000 unit per tahunnya.	2013			PT Solusi Tunas Pratama Tbk, perusahaan penunjang telekomunikas	Pertumbuhan minimal 1.000 unit secara organik.

Menara Telekomunikasi Tumbuh

PT Solusi Tunas Pratama Tbk, perusahaan penunjang teleko-
munikasi, menargetkan pertum-
buan pendapatan tahun ini
hingga 50 persen dari tahun se-
belumnya. Pendapatan tahun la-
lu diperkirakan mencapai Rp
496,5 miliar. Direktur Utama PT
Solusi Tunas Pratama, Nobel
Tanihaha, di Jakarta, Senin
(28/1), mengatakan, peningkatan
pendapatan akan ditopang ber-
tambahnya menara perseroan.
Setiap tahun jumlah menara
bertambah minimal 6.000 unit.
"Pertambahan menara akan di-
lakukan secara organik dan aku-
isisi," kata Nobel. Ia menarget-
kan pertambahan jumlah me-
nara dan infrastruktur lebih
tinggi dari pertumbuhan sektor
telekomunikasi. Dengan kondisi
saat ini, perseroan menargetkan
pertumbuhan minimal 1000
menara secara organik. (BEN)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

Halaman:

NETRAL

NEGATIF (-)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☒ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☒ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Infrastruktur (Pararel Perbatasan dapat Rp 600 Miliar)	Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana Rp 600 Miliar untuk melanjutkan proyek pembangunan jalan paralel perbatasan Indonesia dan Malaysia, sepanjang 866 kilometer di Kalimantan Barat.	2013	2016	Rp 600 Miliar	Kementerian Pekerjaan Ummum	

INFRASTRUKTUR

Paralel Perbatasan Dapat Rp 600 Miliar

PONTIANAK, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana Rp 600 miliar untuk melanjutkan proyek pembangunan jalan paralel perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat pada 2013. Jalan sepanjang 866 kilometer itu diharapkan selesai tahun 2016.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat Jakius Sinyor, Senin (28/1), mengungkapkan, tahun 2012, jalan paralel perbatasan sudah mulai dikerjakan dengan anggaran Rp 200 miliar. Jalan paralel yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 7,1 triliun itu adalah jalan yang menghubungkan ujung barat dan ujung timur Kalbar di sepanjang kawasan perbatasan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak, Malaysia.

Negara tetangga, Malaysia, sudah membuat jalan paralel perbatasan sejak dua dekade lalu. Akses dari pusat pemerintahan Negara Bagian Sarawak ke perbatasan sangat mudah.

"Jalan paralel dikerjakan dalam empat seksi supaya lebih cepat selesai dan bisa digunakan masyarakat. Harapannya, tahun 2016 ujung barat dan ujung timur Kalbar sudah terhubung jalan paralel perbatasan atau jalan poros utara," ujar Jakius.

Keempat seksi itu ialah jalan

dari Sambas-Bengkayang, Bengkayang-Sanggau, Sanggau-Sintang, dan Sintang-Kapuas Hulu.

Jalan poros selatan Kalbar tinggal menyisakan 20 kilometer antara Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Tengah yang diperkirakan bisa selesai pengerjaannya pada 2013 ini. Jalan poros tengah Kalbar masih menyisakan sekitar 90 kilometer lagi antara Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalteng.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalbar, Erma S Ranik, menuturkan, jalan paralel perbatasan tersebut adalah tahap awal membuka isolasi kawasan perbatasan. Setelah jalan itu selesai dibangun, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Adapun Pemerintah Provinsi Bali terus mempersiapkan segala kebutuhan menjelang konferensi internasional APEC yang dijadwalkan Oktober mendatang. Persiapan itu antara lain memperbaiki jalan-jalan rusak.

"Perbaikan jalan menelan Rp 230 miliar untuk 150 kilometer jalan provinsi yang rusak berat dan kategori rusak sedang. Target perbaikan selesai pertengahan tahun ini," kata Kepala Biro Humas Provinsi Bali Ketut Teneng, Senin. (AHA/AYS)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Infrastruktur/Air Bersih(Pemerintah dan Operator digugat warga)	Warga DKI Jakarta menggugat agar Perusahaan Minum Daerah DKI memutuskan kontrak kerja sama dengan 2 operator swasta. Alasannya adalah akibat kontrak ini tariff air di Jakarta jai mahal, Rp 7.800 per kubik, kualitas distribusi dan air pun buruk (warna kuning).	2013				

AIR BERSIH

Pemerintah dan Operator Digugat Warga

JAKARTA, KOMPAS — Warga menggugat penyelenggara negara atas kualitas pelayanan air bersih yang belum optimal. Mereka meminta kontrak kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta dengan dua operator swasta dihentikan. Pengelolaan air bersih harus dilaksanakan kembali oleh PAM Jaya.

Gugatan yang dilayangkan 14 warga ini memasuki tahapan mediasi kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (28/1).

Ada tujuh pihak tergugat, yakni Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya). Dua operator, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Actra Jakarta, juga jadi tergugat.

Kuasa hukum penggugat, Arif Maulana, mengatakan, perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dan operator harus dihentikan karena melanggar sejumlah peraturan, antara lain Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, serta Perda Nomor 13 Tahun 1992 tentang PAM Jaya.

"Akibat kerja sama ini, pengelolaan air bersih mengedepankan keuntungan. Imbasnya, tarif air di Jakarta rata-rata sangat mahal, Rp 7.800 per meter kubik," ujar Arif.

Pasokan air ke pelanggan juga kerap terhenti karena ada kerusakan jaringan atau kurangnya pasokan air baku. Selain itu, dis-

tribusi air belum merata di seluruh Jakarta. Kondisi ini merugikan warga, terutama warga miskin.

"Air sering kali berwarna ke-kuningan, bau kaporit, bahkan tidak keluar. Air PAM hanya saya pakai untuk mencuci, masak, dan mandi. Kalau untuk minum, saya harus beli air galon," ucap Nurhidayah, warga Cilincing, Jakarta Utara.

PAM siap kelola air

Kuasa hukum PAM Jaya, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, pihaknya siap melaksanakan keputusan pengadilan ataupun kebijakan pemilik perusahaan, yakni Pemprov DKI Jakarta.

"Kalaupun perjanjian kerja sama dengan operator harus diputus, kami siap mengelola air. Yang penting air tersedia dengan baik dan tarifnya tidak memberatkan konsumen," tuturnya.

Penyusunan tarif air PAM, menurut Fickar, dilakukan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Dia mengesalkan agar ada pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta untuk membahas masalah ini.

Tamrin M Zakaria Amin, kuasa hukum Menteri Pekerjaan Umum, mengatakan, kerja sama PAM Jaya dan operator tidak dalam konteks swastanisasi. "Ini peran serta swasta untuk memberikan peningkatan pelayanan ke masyarakat," kata Tamrin.

Dia mengatakan perlu pertemuan bersama dengan penda untuk melihat persoalan secara jernih dan transparan. (ART)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:



POSITIF (+)



NETRAL



NEGATIF (+)

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☒ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Ekspor Biofuel Indonesia Makin Memanas	<ul style="list-style-type: none">- Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan volume ekspor biofuel sepanjang tahun ini meningkat 21,43% year-on-year (YoY) menjadi 1,7 Juta kiloleter- Di pasar ekspor, 90% produk biofuel asal asal Indonesia di jual ke Negara-negara seperti Italia dan Jerman- Gapki memproyeksikan ekspor minyak sawit olahan pada tahun ini naik tajam ketimbang ekspor minyak mentah					

■ PERKEBUNAN

Ekspor Biofuel Indonesia Makin Memanas

JAKARTA. Industri minyak sawit olahan Indonesia mulai menggeliat. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan volume ekspor *biofuel* sepanjang tahun ini meningkat 21,43% *year-on-year* (YoY) menjadi 1,7 juta kiloliter.

Salah satu pemicu kenaikan ekspor *biofuel* karena bea keluar untuk produk olahan sawit lebih rendah ketimbang bea keluar produk mentah, seperti minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO).

Jika sebelumnya volume ekspor *biofuel* setara 58% dari total ekspor produk minyak sawit, maka, "Tahun ini naik menjadi lebih dari 60% total ekspor," kata Susanto, Ketua Bidang Pemasaran Gapki, Senin (21/1).

Volume ekspor *biofuel* pada

2012 tumbuh 40% (YoY) menjadi 1,4 juta kiloliter. "Ekspor biofuel ini tergantung kondisi harga minyak bumi. Jika harga minyak bumi lebih rendah dari CPO, maka permintaan biodiesel dunia akan meningkat," kata Susanto.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan, mengatakan, Eropa masih menjadi pasar utama produk *biofuel* asal Indonesia. Sedangkan pasar *biofuel* domestik masih terbatas, "Hanya PT Pertamina yang menyerap," kata dia.

Di pasar ekspor, 90% produk *biofuel* asal Indonesia dijual ke negara-negara seperti Italia dan Jerman. Adapun sisanya masuk ke negara lain seperti Amerika Serikat yang seberat 30.000 kiloliter per ta-

hun dan Korea Selatan sebanyak 2.000 kiloliter per tahun.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, mengatakan, pada tahun ini produksi *biofuel* lebih tinggi dibandingkan realisasi produksi tahun lalu.

Pasar biofuel domestik masih terbatas, hanya PT Pertamina yang menyerap.

Pada 2012, pemerintah menargetkan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) di pasar domestik mencapai 886.000 kiloliter, yang meliputi bioetanol seberat 232.000

kiloliter dan biodiesel seberat 654.000 kiloliter.

Dengan penurunan harga CPO, penyerapan *biofuel* diharapkan meningkat. "Kalau harga CPO turun, harga *biofuel* ikut turun sehingga lebih mudah masuk pasar," kata Maritje. Pada tahun ini penyerapan *biofuel* domestik ditaksir lebih dari 900.000 kiloliter.

Gapki memproyeksikan ekspor minyak sawit olahan pada tahun ini naik tajam ketimbang ekspor minyak sawit mentah. Di 2012, ekspor minyak sawit olahan 10,44 juta ton dan tahun ini berpotensi mencapai 12 juta ton. Sedangkan ekspor minyak sawit mentah pada 2013 menjadi 8 juta ton, naik tipis dari tahun lalu seberat 7,56 juta ton.

Fitri Nur Arifenie